

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH 2024

Menunjang cross cutting Walikota 2024

RPJMD
WALIKOTA

MISI 3 : Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multi Kultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata.

SASARAN : Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Indikator :

1. Indeks Stabilitas

TUJUAN OPD

Tujuan : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Indikator :

Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Yang Diselesaikan

RENSTRA
KEPALA OPD

SASARAN : Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Indikator :

1. Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Target : 85%)
2. Persentase pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang ditindaklanjuti (Target : 85%)
3. Persentase kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang aktif (Target : 85%)

BIDANG

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Indikator :

1. Presentase pelanggaran perda yang di tangani (Target : 77%)
2. Presentase Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Target : 77%)

SEKSI

Kegiatan

Kegiatan 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Target : 85%)

Kegiatan 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Target : 85%)

Kegiatan 3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten / Kota (Target : 81%)

Indikator 1 Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (Target : 85%)

Indikator 2 Persentase Peraturan daerah yang ditangani (Target : 85%)

Indikator 3 Persentase Pengembangan dan peningkatan kapasitas PPNS (Target : 81%)

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Target: 3 jenis)

Sub Kegiatan 2 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Target: 19 dokumen)

Sub Kegiatan 3 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Target : 45 dokumen)

Sub Kegiatan 4 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (Target : 153 orang)

Sub Kegiatan 5 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Target : 2 dokumen)

Sub Kegiatan 6 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Target : 12 laporan)

Sub Kegiatan 7 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Target : 12 laporan)

Sub Kegiatan 8 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Target : 12 laporan)

Sub Kegiatan 9 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Target : 4 laporan)

Indikator 1 Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Target : 3 jenis)

Indikator 2 Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Target: 19 dokumen)

Indikator 3 Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Target : 45 dokumen)

Indikator 4 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (Target : 153 orang)

Indikator 5 Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Target : 2 dokumen)

Indikator 6 Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda /perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha (Target : 12 laporan)

Indikator 7 Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota (Target : 12 laporan)

Indikator 8 Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP (Target: 12 laporan)

Indikator 9 Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (Target : 4 laporan)